

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesian. Pancasila sebagai pandangan hidup mengharuskan bangsa Indonesia untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam pasal-pasal-pasal. dipungkiri lagi nilai-nilai yang bersifat universal (umum) tersebut berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai khusus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila (nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan). Berikut ini adalah kutipan dari UUD 1945 berikut nilai yang merupakan salah satu dari 45 butir nilai Pancasila:

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: (a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (c) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: (a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (b) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (c) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

Sila ketiga Persatuan Indonesia: (a) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. (b) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: (a) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (b) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: (a) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, (b) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Menyadari bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa maka bangsa Indonesia harus dapat mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam penghayatan dan pengamalannya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Perwujudan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara juga diungkapkan oleh Widjaja.

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada

perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya (Widjaja, 2000:2).

Dari penjelasan di atas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai yang bersifat khusus yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara lain. Dimana dalam mewujudkannya harus disertai dengan kesadaran warga Indonesia akan tanggung jawabnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan) seharusnya timbul dan tumbuh di kalangan masyarakat tanpa adanya rekayasa. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupannya serta tidak dipaksakan. Dalam kehidupan bermasyarakat ada salah satu jalur untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila, diantaranya adalah kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) yaitu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaan gerakan tersebut dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, BKKBN

diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pedesaan atau perkampungan yang belum berkembang.

Kampung KB ini dirancangan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan Januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit. Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, serta pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kampung KB adalah dengan Pembinaan Kelompok Tribina. Kelompok Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) melalui penerapan program PKK. Adapun tujuan atau inti dari program Tribina

yaitu untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga.

Sebagaimana dalam No. 99 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) Tentang Gerakan PKK mengatakan bahwa :

“Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan”

Kegiatan program PKK mendorong kaum ibu untuk lebih berpartisipasi secara aktif di dalam mengamalkan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun lingkungan masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada di PKK yaitu: (1) Pembinaan anak remaja adalah upaya untuk menumbuhkan perilaku, sopan santun sesuai budaya bangsa, (2) Peningkatan kualitas ulos dan peningkatan pemasaran hasil dari tenun ulos, (3) Meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial, (4) Pembinaan Lansia (lanjut usia) agar dapat menjaga kesehatan, keterampilan dan melaksanakan kegiatan secara produktif, (5) BKN (Bina Keluarga Balita) yang dilakukan dengan cara memberi penyuluhan tentang hidup sehat, pentingnya pendidikan anak sejak dini, (6) Peningkatan mutu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dimana selain mengadakan posyandu rutin

juga disertai dengan penyuluhan berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, (7) Pembinaan keagamaan yaitu kegiatan pengajian/siraman rohani oleh tokoh masyarakat yang diikuti oleh ibu-ibu Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

PKK terdiri dari sepuluh program yaitu: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat. Dengan sepuluh program PKK tersebut maka pengamalan nilai pancasila (nilai ke Tuhanan, keadilan, kemanusiaan dan nilai kerakyatan). Penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pemahaman secara terpadu. PKK merupakan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerak utama untuk menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, dan mandiri. Dari sisi programnya, PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitra sejajar antara laki-laki dan

perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Toba merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang terdiri 16 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Uluan. Sebagai besar penduduk Kecamatan Uluan mayoritas suku Toba yang ada di Kabupaten Toba. Di Toba terdapat sebanyak sepuluh kampung KB, salah satunya adalah kampung KB yang ada di Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba. Mayoritas penduduk Kecamatan Uluan memeluk agama kristen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba tahun 2020 mencatat penduduk kecamatan ini yang menganut agama Kristen Protestan 83,10% Khatolik 9,63% Islam 0,90% dan Budha 0,01%.

Desa Siregar salah satu kampung KB yang ada di Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang turut melaksanakan program penerapan kegiatan PKK. Desa Siregar terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Hutabolon, Tiggiran dan Toba Holbung jumlah penduduk 559 jiwa, serta jumlah KK sebanyak 130 KK. Dengan rincian KK laki-laki 262 jiwa, KK perempuan 297 jiwa pada tahun 2019. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Siregar antara lain bertani, berladang, nelayan, PNS, dan pengerajin ulos.

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2021 Sekretaris Desa Siregar, beliau adalah ibu Romasi Siregar. Menyatakan bahwa kelompok PKK menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan dikarenakan adanya kerjasama antar anggota PKK dengan pemerintah, karena pemerintah memberi dana bantuan berupa uang kegiatan PKK kepada desa tersebut untuk memajukan Desa Siregar.

Pada saat pandemi Covid-19 saat ini mengakibatkan kurangnya keikutsertaan kelompok PKK di Desa Siregar menjadi kurang baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat partisipasi PPK dengan kader juga mulai menurun. Dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19, diwajibkan seluruh kader PKK melaksanakan protokol kesehatan di tiap kegiatan. Dari 10 program pokok PKK tetap dilaksanakan program tersebut yang biasanya ada kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, dan salah satu kegiatan dalam bidang pendidikan dan keterampilan yaitu pengerajin ulos yang menjadi bidang keunggulan dalam penerapan program PPK di Desa Siregar. Tujuan dari pendidikan dan keterampilan dompet dan tas yang terbuat dari kain ulos ini untuk menambah penghasilan dan sumber daya manusia, yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan yaitu menggali potensi dan kemampuan diri yang akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi keluarga.

Anggota ibu-ibu PKK dan pemuda-pemudi remaja Desa Siregar melakukan pertemuan untuk menunjukkan langsung cara pembuatan tenun ulos tersebut. Ibu-ibu anggota PKK juga mengarahkan remaja Desa Siregar untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan terkait salah satu program kegiatan PKK. Maka dari itu Ibu-ibu PKK membuat dompet dan tas yang terbuat dari kain ulos tersebut untuk di dagangkan di penginapan (Hotel), online, pasar dan kedai (warung). Masyarakat cenderung terbuka dan terlihat jelas memiliki nilai kategori dua poin program pokok PKK yaitu penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan pendidikan keterampilan dilihat dari sikap gotong royong yang kuat, serta saling menghargai satu sama lain, begitu juga halnya dengan pemuda-pemudi/remaja dan Ibu PKK Desa Siregar.

Di masa pandemi Covid-19 ada peraturan pemerintah untuk kesejahteraan warga negara, warga negara yang dimaksud disini adalah keluarga. Pemerintah dalam hal ini terjun langsung ke Desa Siregar itu ada tentang gerakan PKK yang dana nya dari dana desa. Dana desa ini tujuannya untuk kesejahteraan keluarga (warga negara), menyinggung tentang program PKK yang berjalan bahwa kegiatan PKK dalam satu tahun ini tidak berjalan dikarenakan pandemi virus Covid-19, namun tahun 2021 nanti akan berjalan kembali tetapi masih dilakukan pembatasan dalam kegiatan yang berlangsung dikarenakan masih dalam pandemi Covid-19. Melakukan pembatasan yang dimaksud adalah dalam pertemuan kegiatan PKK sesuai protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Pembatasan dalam prokja yang dilakukan seperti awal akan dibatasi yakni mempersingkat waktu dalam kegiatan, yaitu pembatasan waktu sesuai aturan dan anjuran pemerintah untuk menghindari Covid-19.

Salah satu program PPK di Desa Siregar adalah menenun ulos dengan menggunakan alat tenun dan tidak menggunakan mesin, untuk di jadikan salah satu kain khas pada saat acara adat Batak Toba seperti kematian dan pernikahan. Oleh sebab itu kain ulos sangatlah mahal harganya sehingga perekonomian warga sangat terbantu. Akan tetapi pada saat pandemi Covid-19 ini permintaan konsumen menurun karena pesta Batak Toba di berhentikan untuk sementara karena dilarang berkerumunan atau berkumpul-kumpul, maka dari itu Ibu-ibu PKK membuat dompet dan tas yang terbuat dari kain ulos tersebut untuk di dagangkan di penginapan (Hotel), online, pasar dan kedai (warung).

Nilai ketuhanan seperti pembinaan keagamaan oleh tokoh masyarakat yang dilakukan setiap seminggu sekali. Nilai kemanusiaan terlihat dari kegiatan rutin Posyandu (pos pelayanan terpadu) terhadap balita dengan cara memberikan imunisasi kekebalan tubuh terhadap penyakit. Hal ini merupakan usaha untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat. Nilai persatuan dari sikap kebersamaan anggota dalam menjalankan setiap program demi mewujudkan Desa Siregar menjadi desa yang lebih baik. Nilai kerakyatan terwujud dari kebiasaan musyawarah mufakat untuk menentukan setiap kebijakan. Sedangkan nilai keadilan di dalam pembagian dan pelaksanaan tugas secara adil sesuai dengan jabatannya masing-masing dalam kegiatan PPK.

Sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang dilaksanakan dalam kelompok PPK di Desa Siregar mengandung nilai-nilai yang akan dicapai yaitu mewujudkan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati kebebasan menjalankan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama.

Implementasi Nilai-nilai Pancasila sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam kegiatan PKK di Desa Siregar yaitu setiap kegiatan rutin kelompok PKK selalu diawali dengan mengucapkan salam. Kegiatan mengucapkan salam itu selalu dilakukan bahkan sudah membudaya dalam keseharian mereka. Setelah mengucapkan salam untuk kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan biasanya didahului dan diakhiri dengan berdo'a bersama.

Dari penjabaran di atas, menunjukkan bahwa PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan wujud konkrit pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, yang di dalamnya terdapat 10 program pokok PKK, dan salah satu program tersebut adalah program penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang berarti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti dan membahas permasalahan tersebut secara lebih dalam. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila melalui program PKK di kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila melalui penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila melalui penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila melalui penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila melalui penerapan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba.

1.5 Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, disamping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir program studi pendidikan pancasila dan ilmu kewarganegaraan fakultas ilmu sosial, juga diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti dalam bidang pendidikan pancasila dan ilmu kewarganegaraan. Serta menambah wawasan peneliti dalam melihat keterlibatan perempuan dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

- b) Secara Praktis

Dari manfaat teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan mahasiswa lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn). Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Penelitian ini dapat digunakan sebagai Bagi pihak yang diteliti atau Tim Penggerak PKK, di kampung KB Desa Siregar Kecamatan Uluan Kabupaten Toba hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan pelaksanaan Program Gerakan PKK atau sekurangkurangnya dapat dijadikan referensi untuk evaluasi pelaksanaan PKK.



THE
Character Building
UNIVERSITY